

Masyarakat Harus Peka Kekerasan

Pendidikan publik dan kampanye yang masif perlu terus digencarkan demi mencegah terulangnya kekerasan dalam rumah tangga.

DHIKA KUSUMA WINATA
dhika@mediaindonesia.com

KASUS kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih tinggi. Selama 2017, data Komisi Nasional Perempuan menyebutkan ada 348 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan yang didominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Amirrudin mengatakan tingginya angka tersebut menjadi sinyal semakin banyaknya perempuan yang berani melaporkan kekerasan yang dialami.

“Korbannya bisa jadi lebih dari angka itu. Paling tidak itu menunjukkan semakin banyak pengaduan. Para korban semakin berani untuk

melaporkan. Tersedianya layanan bagi korban juga semakin dikenal,” kata Mariana, Minggu (11/3).

Karena itu, menurutnya, pendidikan publik dan kampanye yang masif perlu terus digencarkan demi mencegah terulangnya KDRT. Masyarakat juga diharapkan semakin peka jika melihat tindak KDRT di lingkungannya dengan melaporkan.

“Kesadaran masyarakat perlu dibangkitkan. Caranya melalui pendidikan publik dan kampanye bahwa kekerasan terhadap perempuan itu melanggar,” tukasnya.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH Apik) Jakarta, Siti Mazumah, menyatakan tidak semua korban KDRT memilih

proses hukum. Itu karena lamanya proses tersebut serta biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Dari sekitar 300 kasus KDRT yang ditangani LHB Apik pada tahun lalu, hanya 17 yg menempuh jalur hukum. “Kasus KDRT tingkat penyelesaiannya hanya 6%. Ada korban yang memutuskan solusi lewat jalur mediasi atau perceraian.”

Dia juga menyebut mayoritas pihak yang mengadu ke LBH Apik umumnya perempuan yang mengalami kekerasan selama bertahun-tahun.

Jangan terulang

Terkait dengan kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan, penguatan karakter peserta didik harus dimulai dari rumah tangga. Menghormati yang lebih tua apalagi kalau guru harus dengan penghormatan yang lebih tinggi menjadi doktrin yang wajib diterapkan agar kasus murid menghajar guru tidak terulang lagi.

“Kekerasan murid kepada

gurunya tidak serta-merta kesalahan anak-anak. Itu juga terkait dengan kultur pendidikan karakter yang sudah terabaikan di rumah tangga. Sekolah ialah tempat kedua. Sebelum sekolah ada rumah karena berperan penting menumbuhkan watak kasih sayang kepada siapa pun,” kata Kasubdit Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Madrasah Kemenag, Basnang Said, kemarin.

Kabag Humas Kemenag Mastuki menambahkan pihaknya berharap kejadian itu tak berulang dan menjadi pelajaran berharga bahwa hubungan antara guru dan murid perlu dibangun berdasarkan nilai-nilai pedagogis yang dihayati.

“Agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi, di sinilah pentingnya nilai-nilai edukasi itu dipraktikkan. Makanya menjadi guru harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi personal, kepribadian, sosial, selain kompetensi akademik dan profesional,” tambah Mastuki.

Komisioner KPAI Retno Listiyarti mengatakan sikap anak yang cenderung melakukan kekerasan biasanya berawal dari keluarga akibat dari pola asuh. “Karena pendidikan anak tidak hanya di sekolah tetapi juga di rumah dan di lingkungan masyarakat,” kata Retno, kemarin. (Yan/H-5)